



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 09 /V.03/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013, maka dipandang perlu menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. Secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - b. Melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Perangkat Daerah (PD);
 - c. Mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP - Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. Wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. Menyiapkan dokumen yang digunakan dalam penatausahaan Bendahara Penerimaan yaitu :
 - 1. Buku Kas Umum;
 - 2. Buku pembantu per-rincian objek penerimaan; dan
 - 3. Buku rekapitulasi penerimaan harian.
- f. Baik secara langsung dan maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau penyimpanan uang pada satuan bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
- g. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima;

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

- a. Secara Fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- b. Menyiapkan dokumen yang digunakan dalam menatausahakan antara lain :
 - 1. Buku Kas Umum;
 - 2. Buku simpanan/bank;
 - 3. Buku pajak;
 - 4. Buku Panjar;
 - 5. Buku Bantu Pengeluaran Perincian Objek/rekening; dan
 - 6. Register SPP – UP/GU/TU/LS.
- c. Baik secara langsung dan maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau penyimpanan uang pada satuan bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
- d. Melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

Tembusan, Yth;

NANANG ERMANTO

1. Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri.
4. Gubernur Lampung.
5. Inspektur Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala KPPN Bandar Lampung.
8. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
9. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
10. Kepala Pelayanan Pajak Lampung.
11. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se- Kabupaten Lampung Selatan.
12. Pimpinan PT. Bank Lampung Teluk Betung.
13. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.
14. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Tanjung Karang.

**DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN NAMA, NIP, PANGKAT, GOL	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA, NIP, PANGKAT, GOL
1	2	3	4
1	BUPATI DAN WAKIL	—	MERI YULINDA S. SE.,MM 19820528 200901 2 005 Penata Muda Tk I (Gol. III/b)
2	SEKRETARIAT DAERAH	V. TITIK SUKAMTI 19641211 198502 2 001 Pengatur Tk. I (Gol. II/d)	MERI YULINDA S. SE.,MM 19820528 200901 2 005 Penata Muda Tk I (Gol. III/b)
3	DPRD	—	Hj. ROSMININGSIH, SE 19680906 199303 2 004 Penata (Gol. III/b)
4	SEKRETARIAT DPRD	—	ERWIN, SE.,MM 19810515 200801 1 012 Penata Muda Tk. I (Gol. III/a)
5	INSPEKTORAT	—	ROHIDIN, S.Sos 19790906 200901 Penata (Gol. III/c)
6	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	—	SRI AYU RAMA DHENTI 19730928 200701 2 005 Pengatur (Gol. II/c)
7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	—	TEDDY OKTARIZA, SE 19801006 200701 1 002 Penata Muda Tk I (Gol. III/b)
8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (PPKD)	HAMIMA PUTRIYANA, SE 19830523 200312 2 002 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	TONI PERDANA PUTRA, A.Md 19900609 201503 1 001 Pengatur (Gol. II/c)
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	—	AGUS WIDIANTORO 19800820 201407 1 002 Pengatur Muda (Gol. II/a)
10	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	—	YULIA WATI 19820712 200312 2 004 Pengatur Tk. I (Gol. II/d)
11	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	DESTI WULANDARI, A.Md 19801224 200901 2 001 Pengatur Tk. I (Gol. II/d)	ELIYANA, SE 19840426 201407 2 003 Penata Muda (Gol. III/a)
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	—	RINTO EFRILIAN, S.E 19790419 200801 1 007 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	—	DONNY DAVINCI, S.Pd.I 19910116 201503 1 002 Penata Muda (Gol. III/a)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	—	FAJAR KURNIADI 19811111 200901 1 006 Pengatur (Gol. II/c)
15	DINAS PENDIDIKAN	—	SRI WIDIYARTO, SE 19770626 200501 1 018 Penata (Gol. III/c)
16	DINAS KESEHATAN	HB. SUHARYADI 19620309 198603 1 005 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	RUSMINDARTO 19670601 198703 1 004 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN NAMA, NIP, PANGKAT, GOL	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA, NIP, PANGKAT, GOL
1	2	3	4
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ISTAMAR FADIL 19631219 198711 1 001 Pengatur Tk. I (Gol. II/d)	FENNY SUHENDAR, ST 19860517 201407 1 001 Penata Muda (Gol. III/a)
18	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	FERAWATI, A.Md.Kom 19830503 201407 2 001 Pengatur (Gol. II/c)	MUHAMMAD SODIKIN, SE 19791106 200701 1 003 Penata Muda (Gol. III/a)
19	DINAS SOSIAL	—	FITRI RIZKINA, Amd 19860620 201001 2 005 Pengatur Tk. I (Gol. II/d)
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	—	INDRA EKA PUTRA 19780330 200212 1 006 Pengatur Tk. I (Gol. II/d)
21	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. BOB BAZAR, SKM	DESTA NIASARI 19820407 200701 2 002 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	FATIMAH, SIP 19671021 198903 2 005 Penata Tk. I (Gol. III/d)
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	—	FATWA ASHARI FIRMANSYAH 19861020 201407 1 001 Pengatur Muda (Gol. II/a)
23	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	—	KEN ZABIDI KOHAR, ST 19791002 201407 1002 Penata Muda (Gol. III/a)
24	DINAS KETAHANAN PANGAN	—	SANTI ANDRIANI, SP 19800318 201407 2 001 Penata Muda (Gol. III/a)
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	—	ISKANDAR, A Md 19690610 200604 1 007 Penata Muda (Gol. III/a)
26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	—	HEPI RATNAWATI, SE 19760404 200801 2 011 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)
27	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	—	NURHAYATI 19831212 200901 2 010 Pengatur (Gol. II/c)
28	DINAS PERHUBUNGAN	AHMAD FATONI, S.IP 19791010 200801 1 020 Penata Muda (Gol. III/a)	GEDE MADE MARDITA, MSP, A.Md Kom 19860501 201503 1 001 Pengatur (Gol. II/c)
29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SIGIT PURNOMO, ST 19780421 201001 1 007 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	DONI NURMAN, S.Kom 19900615 201503 1 001 Penata Muda (Gol. III/a)
30	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	DESMON, SE 19701211 200701 1 013 Penata Muda (Gol. III/a)	SRI WAGININGSIH 19700129 199302 2 002 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)
31	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	—	VHINA YUSRIANIATI, A.Md 19830919 201101 2 007 Pengatur Tk. I (Gol. II/b)
32	DINAS PERIKANAN	FICA DESTIANA ROZA 19861222 201407 2 005 Pengatur Muda (Gol. II/a)	HERTINA 19860228 201001 2 003 Pengatur (Gol. II/c)
33	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	RIZKI HABIBI, A.Md 19810622 200801 1 008 Penata Muda (Gol. III/a)	TARMIZI, SS 19790617 200801 1 005 Penata Muda (Gol. III/a)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN NAMA, NIP, PANGKAT, GOL	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA, NIP, PANGKAT, GOL
1	2	3	4
34	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	—	TRI WIDIASTUTI, S.T.P 19830511 201407 2 002 Penata Muda (Gol. III/a)
35	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	YHONI SAKUNNATA, SKH 19830606 201101 1 003 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	FENTY ARISTIA, A.Md 19920414 201503 2 003 Pengatur (Gol. II/c)
36	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	—	MUGIARTI, HS 19830707 200801 2 009 Pengatur (Gol. II/c)
37	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	M. NATSIR HENDY TRI PUTRA, SE 19830911 200901 1 003 Penata Muda (Gol. III/a)	CORIE MAHARAM, S.A.N 19920304 201503 2 002 Penata Muda (Gol. III/a)
38	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	RINAWATI, SE 19800816 200801 2 011 Penata Muda (Gol. III/a)	EVI SARI UTAMI, SE 19900112 201503 2 005 Penata Muda (Gol. III/a)
39	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	—	DANEIL SENTOSA SEMBIRING, A.Md 19700510 199703 1 007 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)
40	KECAMATAN WAY SULAN	—	HERIYANTO, ST 19810914 201101 1 001 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)
41	KECAMATAN MERBAU MATARAM	—	WIDODO 19790826 201407 1 003 Pengatur Muda (Gol. II/a)
42	KECAMATAN NATAR	TITI MUSINAH, SE 19760909 199703 2 003 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	RIDWAN YUNANTO 19840719 201407 1 005 Pengatur Muda (Gol. II/a)
43	KECAMATAN WAY PANJI	—	ACAM SUYANA, SH 19820802 200801 1 013 Penata Muda (Gol. III/a)
44	KECAMATAN RAJABASA	—	SURIHAPANI 19740108 200604 1 006 Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b)
45	KECAMATAN TANJUNG SARI	—	RESWANTO 19780608 201407 1 002 Pengatur Muda (Gol. II/a)
46	KECAMATAN CANDIPURO	—	ELWIN SUSIANI, SE 19750809 200701 2 005 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)
47	KECAMATAN PENENGAHAN	—	NURAIIDA 19810914 200901 2 001 Pengatur (Gol. II/c)
48	KECAMATAN JATI AGUNG	—	TRI MULYONO 19830827 200901 1 005 Pengatur (Gol. II/c)
49	KECAMATAN PALAS	—	DEDI KAWARUDIN, S.T.P 19771113 200906 1 001 Penata Muda (Gol. III/a)
50	KECAMATAN KETAPANG	—	SITI AIMAH, SE 19830314 200901 2 006 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN NAMA, NIP, PANGKAT, GOL	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA, NIP, PANGKAT, GOL
1	2	3	4
51	KECAMATAN KALIANDA	—	HASYIM, SH 19650319 200906 1 001 Penata Muda (Gol. III/a)
52	KECAMATAN BAKAUHENI	—	INDRA HARIYANTO BATU BARA, SE 19801030 200901 1 001 Penata Muda (Gol. III/a)
53	KECAMATAN SRAGI	—	SUHADI 19780317 200901 1 006 Penata Muda (Gol. III/a)
54	KECAMATAN SIDOMULYO	—	JUNI FIRMANSYAH, SE 19840606 200901 1 002 Penata Muda (Gol. III/a)
55	KECAMATAN KATIBUNG	—	MUHAMMAD HASAN 19810404 200901 1 012 Pengatur (Gol. II/c)
56	KECAMATAN TANJUNG BINTANG	—	ROHMADI 19661005 198603 1 005 Pengatur Muda (Gol. III/a)

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANO